

Building Inclusive And Safe Classroom

Tofan Priananda Adinata¹, Andika Ronggo Gumuruh², Heriberthus Wicaksono³

PGRI University Banyuwangi

andikaronggo@gmail.com

Abstract

This study developed and evaluated the “Building Inclusive and Safe Classrooms” training program to improve the competency of private junior high school teachers in Banyuwangi Regency in managing student diversity. The goal was to address the problem of low understanding of inclusive education, differentiated learning skills, and the ability to prevent and handle bullying. The method used was a participatory approach through a one-day workshop that included interactive lectures, the development of inclusive lesson plans, conflict management simulations, assistive technology practices, and group discussions. The evaluation results showed a 40% increase in participant understanding (from pre-test to post-test), with the highest achievement in differentiated learning (47%). Qualitatively, 15 inclusive lesson plans and 15 follow-up plans were produced, and a 35-member “Banyuwangi Inclusive Teachers” community of practitioners was formed. Ninety-five percent of participants considered the material relevant, and 90% stated that the training method was effective. This research contributes to providing an applicable and sustainable contextual training model to build teacher capacity in creating learning environments that are responsive to diversity and safe from bullying.

Keyword: *inclusive education, safe classroom, private school.*

Pendahuluan

Pendidikan inklusif di Indonesia didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus/ABK dan anak-anak dengan keragaman latar belakang lainnya) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di sekolah regulier (sekolah umum) terdekat.

Komitmen Indonesia terhadap pendidikan inklusif memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 12 ayat (1)b menekankan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjadi landasan paling kuat, dimana Pasal 40 secara eksplisit mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Peraturan ini menjadi pedoman operasional, menetapkan bahwa sekolah regulier wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan menyediakan kondisi yang mendukung.

Secara kuantitas, jumlah sekolah yang mengklaim sebagai penyelenggara pendidikan inklusif telah meningkat. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek per 2022 mencatat puluhan ribu sekolah telah ditetapkan sebagai pelaksana inklusif. Namun, secara kualitas, implementasinya masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks.

Meski sudah ada payung hukum di tingkat nasional, komitmen pemerintah daerah (Pemda) sangat bervariasi. Tidak semua Pemda memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau petunjuk teknis yang jelas untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Hal ini berakibat pada alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pelatihan guru, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan operasional lainnya. Akibatnya, kebijakan inklusif seringkali hanya menjadi "program simbolis" tanpa dukungan nyata.

Ini adalah tantangan paling krusial. Mayoritas guru di sekolah regulier tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus dan belum mendapat pelatihan yang memadai tentang:

Teknik identifikasi dan asesmen awal ABK.

Strategi pembelajaran berdiferensiasi (differentiated instruction).

Modifikasi kurikulum dan alat evaluasi.

Teknik manajemen perilaku di kelas inklusif.

Penggunaan teknologi asistif.

Kondisi ini membuat guru merasa frustasi, tidak percaya diri, dan kewalahan ketika harus menangani keragaman kebutuhan siswa di kelasnya.

Banyak sekolah regulier, terutama di daerah, yang bangunannya belum aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik. Tantangan ini meliputi:

Tidak adanya jalan landai untuk pengguna kursi roda.

Tidak adanya toilet aksesibel.

Kelas yang sempit dan padat, menyulitkan mobilitas.

Keterbatasan alat peraga dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK (misalnya, buku braille untuk tunanetra).

Budaya dan pola pikir masyarakat, termasuk sebagian tenaga pendidik dan orang tua, masih memandang segregasi (pemisahan) sebagai solusi terbaik. ABK sering kali dilabeli sebagai "anak berkebutuhan khusus" yang seharusnya bersekolah di SLB, dan dianggap akan "memperlambat" proses belajar mengajar di kelas regulier. Stigma ini menciptakan lingkungan yang tidak inklusif secara sosial.

Idealnya, setiap sekolah inklusif didukung oleh Guru Pendamping Khusus, psikolog sekolah, dan

terapis. Namun, kenyataannya, jumlah GPK dan tenaga ahli lainnya sangat terbatas. Guru kelas sering kali harus berjuang sendirian tanpa dukungan sistem yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

Secara keseluruhan, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan untuk pendidikan inklusif. Namun, kesenjangan besar masih terjadi antara kebijakan di atas kertas dan implementasi di lapangan. Tantangan utama bersifat sistemik dan multidimensi, meliputi aspek kebijakan, sumber daya manusia (guru), infrastruktur, dan sosial budaya. Untuk memajukan pendidikan inklusif, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dimulai dari penguatan komitmen pemerintah daerah, pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, serta kampanye masif untuk mengubah paradigma masyarakat tentang inklusivitas.

Kabupaten Banyuwangi merupakan "miniatur Indonesia" yang ditandai dengan keragaman geografis, etnografis, dan sosio-ekonomi. Keragaman ini secara langsung tercermin dalam komposisi peserta didik di kelas-kelas SMP swasta.

Banyuwangi adalah wilayah pertemuan tiga budaya besar: Jawa, Madura, dan Using. Dalam satu kelas perbedaan budaya ini mempengaruhi gaya komunikasi, cara mengekspresikan pendapat, dan respons terhadap otoritas guru. Siswa dari budaya tertentu mungkin lebih vokal, sementara yang lain lebih pasif dan segan. Guru perlu memiliki kecerdasan budaya untuk menciptakan dinamika kelas yang harmonis.

Sebagai kabupaten dengan sektor pariwisata dan pertanian yang kuat, kesenjangan ekonomi cukup terlihat. Siswa dari keluarga pengusaha hotel di kawasan wisata (seperti di Kecamatan Banyuwangi, Licin, atau Glagah) bersekolah bersama-sama dengan siswa dari keluarga nelayan di Muncar atau petani di kaki Gunung Raung.

Meskipun data terpublikasi tentang jumlah ABK di SMP swasta Banyuwangi sangat terbatas, guru di lapangan melaporkan adanya siswa dengan berbagai kebutuhan, seperti:

Disleksia (kesulitan membaca) dan Disgrafia (kesulitan menulis).

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian dan hiperaktif.

Gangguan Spektrum Autisme (ASD) ringan.

Slow Learner (lambat belajar) dan Fast Learner (cepat belajar).

Gangguan Emosional dan Perilaku akibat tekanan sosial atau keluarga.

Tantangan yang dihadapi guru SMP swasta dalam mengelola keragaman ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sekolah negeri.

Guru di sekolah swasta seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelatihan-

pelatihan berkualitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dibandingkan rekan mereka di sekolah negeri. Pelatihan inklusif dan manajemen kelas inklusif adalah materi yang langka. Akibatnya, mereka mengandalkan pengalaman empiris semata yang seringkali tidak memadai.

Sekolah swasta beroperasi dalam logika "layanan jasa". Terdapat tekanan dari orang tua dan yayasan untuk menghasilkan nilai akademis yang tinggi dan lulusan yang berprestasi. Tekanan ini memaksa guru untuk fokus pada "pencapaian kurikulum" dan "nilai ujian", sehingga seringkali mengabaikan kebutuhan individual siswa yang berkebutuhan khusus atau yang tertinggal secara akademis. Guru terjebak dalam paradigma menyelesaikan materi ajar daripada memastikan setiap anak paham.

Sekolah swasta memiliki anggaran yang terbatas dan sangat bergantung pada iuran siswa. Hal ini menyulitkan untuk:

- Merekrut Guru Pendamping Khusus (GPK).
- Membeli alat peraga dan teknologi asistif.
- Memodifikasi infrastruktur fisik menjadi aksesibel.
- Menghadirkan psikolog atau terapis untuk konsultasi.

Banyak guru SMP swasta yang mengajar dengan beban jam mengajar tinggi dan mengajar di lebih dari satu sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, meski tidak sepadat sekolah negeri favorit, rasio guru-siswa di kelas tetap menjadi tantangan. Dalam satu kelas dengan 25-30 siswa yang sangat beragam, hampir mustahil bagi seorang guru untuk memberikan perhatian dan penanganan yang individual.

Keragaman yang tinggi berpotensi memicu konflik dan perundungan, baik verbal, sosial, maupun fisik. Siswa yang berbeda (cara bicara, penampilan, kemampuan ekonomi, atau cara belajar) rentan menjadi sasaran. Guru seringkali tidak terlatih untuk mendeteksi bullying secara dini dan tidak memiliki protokol yang jelas untuk menanganinya, sehingga banyak kasus yang dibiarkan atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa penyelesaian yang tuntas.

Guru-guru SMP swasta di Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada realitas kelas yang sangat heterogen secara etnis, ekonomi, dan kemampuan. Namun, mereka menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus memenuhi tuntutan akademis dari orang tua dan yayasan, di sisi lain mereka tidak dilengkapi dengan kompetensi, sumber daya, dan dukungan sistem yang memadai untuk mengelola keragaman tersebut secara efektif. Kesenjangan inilah yang menyebabkan banyak guru merasa frustasi dan berpotensi menyebabkan praktik pengajaran yang tidak inklusif, dimana siswa dengan kebutuhan khusus atau dari latar belakang marginal terabaikan.

Oleh karena itu, pelatihan yang kontekstual, praktis, dan berfokus pada strategi mengelola

keragaman serta menciptakan iklim kelas yang aman, menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi guru-guru SMP swasta di Banyuwangi.

Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan bukanlah sekadar fasilitas tambahan yang diinginkan, melainkan prasyarat fundamental bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar yang efektif dan bermakna. Lingkungan ini mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional yang memungkinkan siswa merasa diterima, dihargai, dan didukung.

Rasa aman secara psikologis adalah landasan bagi fungsi kognitif tingkat tinggi. Ketika seorang siswa merasa terancam, takut, atau cemas baik karena ejekan, intimidasi, atau perasaan terisolasi otaknya mengaktifkan sistem lawan, lari, atau diam. Bagian otak yang disebut amigdala, yang bertugas memproses emosi seperti ketakutan, menjadi sangat aktif.

Lingkungan yang tidak aman menimbulkan dampak psikologis yang parah dan berkepanjangan, yang secara langsung merusak motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Kelas yang aman menciptakan Zona Perkembangan Proksimal yang ideal, sebagaimana dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Zona ini adalah ruang dimana belajar paling efektif terjadi melalui kolaborasi dan interaksi sosial dengan orang lain.

Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan adalah investasi paling kritis dalam keberhasilan pendidikan. Ini adalah fondasi yang memungkinkan semua strategi pengajaran, kurikulum, dan sumber daya lainnya berfungsi dengan efektif. Tanpa fondasi ini, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan sia-sia, karena otak dan hati siswa tidak berada dalam kondisi yang optimal untuk menerima, memproses, dan mengkonstruksi pengetahuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan bullying serta penciptaan iklim sekolah yang positif harus menjadi prioritas utama, bukan program sampingan, bagi setiap sekolah, termasuk SMP Swasta di Kabupaten Banyuwangi.

Metode

Pelaksanaan pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif dan praktik langsung yang dirancang untuk memastikan peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh. Metode ini dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Tahap Persiapan:

- Koordinasi dengan Mitra: Menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan/atau Asosiasi Guru SMP Swasta Kabupaten Banyuwangi untuk sosialisasi dan rekrutmen peserta.
- Need Assessment Awal: Menyebarluaskan kuesioner dan melakukan wawancara singkat untuk memetakan kebutuhan spesifik peserta.

- Penyusunan Materi: Menyusun modul pelatihan, materi presentasi, dan lembar kerja (worksheet) yang kontekstual dan aplikatif.
- Persiapan Logistik: Mempersiapkan venue, peralatan, dan administrasi pendukung.

2. Tahap Pelaksanaan (1 Hari Pelatihan):

Metode pelaksanaan pada hari-H akan menggabungkan beberapa teknik berikut:

- Ceramah Interaktif: Untuk penyampaian materi konseptual dengan melibatkan tanya jawab dan diskusi.
- Workshop/Praktik Langsung: Peserta secara aktif berlatih menyusun RPP inklusif, membuat instrumen asesmen, dan merancang strategi diferensiasi.
- Studi Kasus & Simulasi/Role-Play: Menganalisis kasus nyata dari lingkungan sekolah dan mempraktikkan teknik menangani konflik atau bullying.
- Diskusi Kelompok: Berbagi pengalaman dan memecahkan masalah bersama dalam kelompok kecil.
- Pemanfaatan Tools Digital: Peserta langsung mencoba aplikasi dan teknologi asistif yang diajarkan.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut:

- Evaluasi Formatif: Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman.
- Evaluasi Sumatif: Kuesioner kepuasan peserta terhadap materi dan fasilitator.
- Pendampingan Pasca-Pelatihan: Membentuk grup komunikasi online (WhatsApp/Telegram) untuk konsultasi dan berbagi praktik baik secara berkelanjutan.
- Monitoring RTL: Memantau pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun peserta melalui laporan singkat dan umpan balik di grup.

Hasil dan Diskusi

Program pengabdian masyarakat bertajuk “Membangun Kelas Inklusif dan Aman” yang dilaksanakan oleh Universitas PGRI Banyuwangi berhasil meningkatkan kompetensi guru-guru SMP Swasta dalam mengelola keragaman peserta didik. Pelatihan ini dirancang sebagai respons terhadap tantangan nyata di lapangan, di mana guru seringkali kekurangan pemahaman komprehensif tentang pendidikan inklusif serta keterampilan praktis untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menangani perundungan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan berkualitas dan dukungan sistemik di sekolah swasta, sehingga program ini hadir sebagai solusi kontekstual dan aplikatif.

Metode pelaksanaan yang digunakan bersifat partisipatif dan eksperiensial, menggabungkan ceramah interaktif, workshop penyusunan RPP inklusif, simulasi penanganan konflik, serta praktik

penggunaan teknologi asistif. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mengembangkan perangkat ajar dan strategi yang siap digunakan di kelas. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan 15 guru dari 15 SMP swasta, didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.965.000 yang dialokasikan untuk konsumsi, transportasi, dan peralatan.

Secara kuantitatif, program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta sebesar 40% yang terukur melalui perbandingan pre-test dan post-test. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman pembelajaran berdiferensiasi (47%), diikuti oleh pemahaman pendidikan inklusif (37%) dan penanganan bullying (36%). Capaian ini menunjukkan efektivitas materi pelatihan dalam menjawab kebutuhan mendesak guru, sekaligus membuktikan bahwa pendekatan pelatihan intensif meski singkat dapat memberikan dampak signifikan jika dirancang secara terstruktur dan relevan.

Pada tataran kualitatif, program ini berhasil menghasilkan perubahan mindset dan kompetensi praktis. Peserta tidak hanya mampu menyusun 15 RPP inklusif dan 15 rencana tindak lanjut, tetapi juga membentuk komunitas praktisi “Guru Inklusif Banyuwangi” yang beranggotakan 35 orang. Komunitas ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan konsultasi berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan kolaborasi dan dukungan kolegial. Selain itu, 95% peserta menyatakan materi pelatihan relevan dengan kebutuhan sehari-hari, dan 90% menilai metode workshop sangat efektif.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendekatan solutif yang terintegrasi, di mana setiap permasalahan mitra dijawab dengan kegiatan pelatihan yang spesifik. Sebagai contoh, kesulitan guru dalam identifikasi keragaman siswa diatasi melalui workshop pemetaan kebutuhan, sementara keterbatasan pemanfaatan teknologi direspon dengan sesi praktik penggunaan aplikasi asistif gratis. Namun, pelaksanaan yang hanya satu hari menjadi tantangan tersendiri, mengingat kompleksitas materi yang disampaikan. Oleh karena itu, rencana pengembangan program mencakup pendampingan lanjutan, pelatihan pelatih (TOT), serta advokasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, program ini telah meletakkan fondasi awal bagi terwujudnya kelas inklusif dan aman di Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kapasitas guru, terbentuknya komunitas belajar, dan tersedianya perangkat ajar inklusif menjadi modal penting untuk transformasi praktik pembelajaran. Ke depan, program serupa perlu diperluas cakupannya, melibatkan lebih banyak sekolah dan pemangku kebijakan, serta didukung oleh sistem monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan inklusif di daerah tersebut.

Kesimpulan

Program pendampingan “Membangun Kelas Inklusif dan Aman” telah memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi guru-guru SMP Swasta di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan, dapat direfleksikan bahwa pendekatan pelatihan yang partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru. Peningkatan signifikan sebesar 40% pada hasil post-test menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, terbentuknya komunitas “Guru Inklusif Banyuwangi” menjadi bukti keberlanjutan kolaborasi dan dukungan antar peserta pasca-pelatihan. Namun, keterbatasan waktu pelatihan yang hanya satu hari menjadi tantangan dalam pendalaman materi dan internalisasi strategi inklusif secara lebih menyeluruh.

Secara umum, program ini telah berhasil menciptakan fondasi awal bagi transformasi praktik pembelajaran inklusif di tingkat sekolah. Perubahan mindset guru dari pendekatan one size fits all menuju pengakuan terhadap keragaman peserta didik merupakan capaian kualitatif yang sangat berharga. Produk konkret seperti RPP inklusif dan rencana tindak lanjut juga menunjukkan kesiapan peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Meskipun demikian, untuk memastikan dampak jangka panjang, diperlukan mekanisme pendampingan dan pengawasan yang lebih sistematis, serta dukungan kebijakan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat.

Berdasarkan refleksi di atas, berikut adalah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan program serupa di masa depan:

1. Peningkatan Durasi dan Pendalaman Materi: Disarankan agar pelatihan serupa dilaksanakan dalam format yang lebih panjang, misalnya 2-3 hari, atau dibagi menjadi beberapa pertemuan intensif. Hal ini akan memberikan ruang yang lebih luas untuk pendalaman materi, praktik berulang, dan refleksi mendalam.
2. Pendampingan Berkelanjutan (Coaching & Mentoring): Membentuk skema pendampingan pasca pelatihan yang terstruktur, misalnya melalui kunjungan kelas (school visit) rutin oleh fasilitator, coaching clinic bulanan secara daring, atau penugasan guru pemandu (master teacher) di setiap sekolah.
3. Pelibatan Pimpinan Sekolah dan Pemangku Kebijakan: Untuk menciptakan ekosistem pendukung, perlu melibatkan kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan Dinas Pendidikan dalam sesi khusus. Tujuannya adalah membangun komitmen bersama dan menyusun kerangka kebijakan sekolah yang mendukung implementasi pendidikan inklusif.
4. Pengembangan Sumber Daya dan Platform Digital: Mengembangkan dan menyebarluaskan modul digital, video pembelajaran, bank RPP inklusif, serta alat asesmen sederhana yang dapat diakses secara daring oleh semua guru di Kabupaten Banyuwangi, tidak terbatas pada peserta pelatihan.

5. Penelitian Tindak Lanjut dan Pemantauan Dampak: Melakukan penelitian atau monitoring evaluasi berjenjang untuk mengukur dampak program terhadap perubahan praktik mengajar, iklim kelas, dan hasil belajar siswa, khususnya siswa dengan kebutuhan berbeda.
6. Ekspansi dan Replikasi Program: Memperluas cakupan program ke sekolah negeri dan jenjang pendidikan lainnya di Banyuwangi, serta mereplikasi model pelatihan ini di kabupaten/kota lain dengan konteks keragaman yang serupa.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, diharapkan transformasi menuju pendidikan yang benar-benar inklusif dan aman di Kabupaten Banyuwangi dapat berlangsung lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi seluruh warga sekolah.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi. (2023). Banyuwangi dalam Angka 2023.

Gini, G., & Pozzoli, T. (2009). Association Between Bullying and Psychosomatic Problems: A Meta-analysis. *Pediatrics*, 123(3), 1059–1065.

Junaidi, et al. (2022). Teacher Readiness in Implementing Inclusive Education. *Journal of ICSAR*, 6(1), 1-7.

Komnas Disabilitas. (2021). Laporan Pemantauan Pemejnuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kustawan, D. (2019). *Pendidikan inklusif & pengembangan pembelajaran yang membangun keberagaman*. Luxima.

Kustawan, D. (2019). Pendidikan Inklusif & Pengembangan Pembelajaran yang Membangun Keberagaman. Jakarta: Luxima.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2012). *The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind*. Bantam.

Sunaryo, dkk. (2023). Tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 7(1), 45-60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.